
Analisis Program Pemberdayaan UMKM Pada Pesantren Se-Sumatera Utara Guna Meningkatkan Pembangunan Pesantren (Studi Kasus Kemenag Sumatera Utara)

Rizki Yuliana¹, Azhari Akmal Tarigan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: rizkiyuliana59@gmail.com, azhariakmaltarigan@yahoo.co.id

Article History:

Received: 08 Mei 2022

Revised: 09 Juni 2022

Accepted: 09 Juni 2022

Keywords: Pemberdayaan UMKM, Ekonomi Pesantren, Ekonomi Islam.

Abstract: Program pemberdayaan ekonomi di pesantren merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kini, pesantren tidak hanya menjadi wadah dalam menuntut ilmu dunia dan agama saja, namun pesantren dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi baik bagi pihak pesantren maupun masyarakat sekitar. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mendirikan usaha di sekitar pesantren. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme, dampak dan hambatan dari adanya program pemberdayaan UMKM di pondok pesantren se Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam (indepth interview) kepada narasumber yang membahas di bidang pemberdayaan UMKM di pondok pesantren se Sumatera Utara. Hasil penelitian yang diperoleh dengan adanya pemberdayaan UMKM dapat membantu financial dan pembangunan pesantren. Bentuk pemberdayaan UMKM yang diberikan pemerintah antara lain workshop, seminar, pelatihan skill serta pemberian dana guna membangun usaha di lingkungan pesantren. Diharapkannya pemerintah dapat terus membantu pesantren yang masih kekurangan dalam financial secara lebih merata hingga ke pelosok daerah di Sumatera Utara. Selain itu, selalu dilakukannya pengawasan dan pemantauan secara berkala di setiap pesantren yang dibina, sehingga dapat di ketahui keberhasilan atau kegagalan dari program pemberdayaan UMKM yang di bina oleh Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan wadah pendidikan serta pengembangan budaya islam di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah pendidikan islam di Indonesia, peran pesantren sudah tidak diragukan lagi dalam memberikan kontribusi bagi pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia baik

secara kualitas maupun kuantitas. Hingga saat ini pesantren masih menjadi institusi pendidikan islam yang terbesar dan berpengaruh serta menjadi sentra pengkaderan ulama dan da'i yang dapat diterima di masyarakat. Pesantren memiliki banyak sekali potensi yang dapat di jadikan sebagai lokomotif dalam pergerakan ekonomi islam. Dalam aktivitasnya, pesantren dapat menjadi wadah dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan syariat islam. Program pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping memiliki tugas pokok dibidang pendidikan, pesantren juga bertanggungjawab dalam bidang sosial di masyarakat sekitar. Bersamaan dengan kiprah pesantren, memiliki fungsi yaitu : (1) mentransformasikan ilmu agama Islam dan nilai-nilai ke-Islaman (*Islamic Values*); (2) menjadi lembaga bidang keagamaan yang selalu melaksanakan kontrol sosial (*Social Control*); dan (3) melakukan perbaikan rekayasa dibidang sosial (*Social Engineering*).¹

Melalui fungsinya, Pesantren dapat menjadi pendorong, menyampaikan motivasi, serta melakukan penguatan dalam membantu masyarakat mampu berdiri sendiri. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi perkembangan sosial budaya, dan tuntutan lapangan pekerjaan, maka peran pesantren pula mengalami perkembangan. Kini, pesantren tidak hanya menjadi wadah dalam menuntut ilmu dunia dan agama saja, namun pesantren dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi baik bagi pihak pesantren maupun masyarakat sekitar.

Adanya program pendampingan dan pengembangan UMKM di Pesantren yang dibina oleh Kementerian Agama diharapkan dapat membangun ekosistem yang sebesar-besarnya, dan memberi bekal kepada para santri untuk membangun ekonomi pesantren. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Umat, termasuk kemandirian pesantren. Di Indonesia program pemberdayaan UMKM sedang digalakkan dalam membangun ekonomi pesantren demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut data dari website kementerian agama, jumlah pesantren saat ini berjumlah 36.517 pesantren.

Berikut sebaran populasi pesantren di Indonesia.

TINGKAT SEBARAN POPULASI PESANTREN



Gambar 1. Sebaran Pesantren di Indonesia

¹Tanjung HB & sugandi A, "Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Tadbir Muwahhid* 1, no. 2 (2017): 101.

Untuk konteks Sumatera Utara, pesantren juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Jumlah pesantren di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019 sebanyak 225 lembaga. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pondok Pesantren	
		SALAFIAH	KHALAFIYAH
1.	Nias	-	-
2.	Mandailing Natal	12	22
3.	Tapanuli Selatan	4	18
4.	Tapanuli Tengah	-	5
5.	Tapanuli Utara	-	-
6.	Toba Samosir	-	-
7.	Labuhan Batu	1	6
8.	Asahan	2	11
9.	Simalungun	-	7
10.	Dairi	-	1
11.	Karo	-	1
12.	Deli Serdang	1	13
13.	Langkat	7	30
14.	Nias Selatan	-	-
15.	Humbang Hasundutan	-	1
16.	Pakpak Barat	-	-
17.	Samosir	-	-
18.	Serdang Bedagai	-	5
19.	Batubara	-	-
20.	Padang Lawas Utara	4	29
21.	Padang Lawas	-	4
22.	Labuhan Batu Selatan	1	16
23.	Labuhan Batu Utara	1	1
24.	Nias Utara	-	-
25.	Nias Barat	-	-
26.	Sibolga	-	-
27.	Tanjung Balai	2	1
28.	Pematang Siantar	-	1
29.	Tebing Tinggi	-	1
30.	Medan	1	9
31.	Binjai	-	2
32.	Padangsidempuan	-	3
33.	Gunung Sitoli	-	2
Jumlah		36	189
Total		225	

Sumber : Renstra Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024

Melihat peningkatan jumlah pesantren di Sumatera Utara, diharapkan mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih baik. Dalam mentransformasikan potensi ekonomi pesantren, diperlukan upaya strategis untuk menjadikannya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kemandirian ekonomi dengan mengembangkan kewirausahaan syariah yang melibatkan pengurus, guru, santri dan alumni.

Dalam mengimplementasikan program pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan menjalankan program kerja sama antara Bank Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berfokus pada tiga program utama, yaitu : kemandirian ekonomi pondok pesantren, kewirausahaan, dan pionir wirausaha santri dan alumni. Adanya program ini bertujuan untuk memberikan dukungan pemerintah terhadap upaya dalam membangun kemandirian dan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren.

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme, dampak dari program pemberdayaan UMKM di pondok pesantren se Sumatera Utara serta peran pemberdayaan UMKM di pesantren.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Mengingat peran strategis UMKM ini maka perlu adanya pemberdayaan agar UMKM mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada BAB II, Pasal 5, tujuan pemberdayaan UMKM, adalah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.²

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 7.034,1 triliun pada 2019, naik 22,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.721,1 triliun. UMKM di Indonesia juga menyerap 119,6 juta atau 96,92% dari total tenaga kerja di unit usaha Indonesia. penyerapan tenaga kerja ini meningkat 2,21% dari tahun 2018.

Besarnya kontribusi UMKM dikarenakan mayoritas unit usaha Indonesia disumbangkan dari UMKM. Sebanyak 64,2 juta atau 99,99% unit usaha Indonesia adalah UMKM. Rinciannya sebanyak 63.4 juta adalah Usaha Mikro (UMi), 783,1 ribu adalah Usaha Kecil (UK), dan 60,7 ribu

²Lathifah Hanim Dan Ms. Noorman, Umkm (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) Dan Bentuk-Bentuk Usaha (Jawa Tengah : Unissula Press, 2018), Hal 28

Usaha Menengah (UM). Sementara Usaha Besar (UB) hanya sebanyak 5,5 ribu atau 0,01% dari total unit usaha. Indonesia. tenaga kerja yang terserap dari unit usaha ini sebanyak 3,6 juta atau 3% dari total tenaga kerja Indonesia.³

2. Pemberdayaan UMKM di Pondok Pesantren

Dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi Pesantren diperlukan sebuah pembangunan Unit Usaha di sebuah pesantren seperti usaha ekonomi guna meningkatkan pembangunan serta pendapatan pondok pesantren. Setidaknya ada empat macam kemungkinan pola usaha ekonomi di lingkungan pesantren; *Pertama*, usaha ekonomi yang berpusat pada kyai sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam mengembangkan pesantren. Misalnya seorang kyai mempunyai perkebunan cengkik yang luas. Untuk pemeliharaan dan pemanenan, kyai melibatkan santri-santrinya untuk mengerjakannya. Maka terjadilah hubungan mutualisme saling menguntungkan:

Kedua, usaha ekonomi pesantren untuk memperkuat biaya operasional pesantren. Contohnya, pesantren memiliki unit usaha produktif seperti menyewakan gedung pertemuan, rumah dsb. *Ketiga*, usaha ekonomi untuk santri dengan memberi ketrampilan dan kemampuan bagi santri agar kelak ketrampilan itu dapat dimanfaatkan selepas keluar dari pesantren. Pesantren membuat program pendidikan sedemikian rupa yang berkaitan dengan usaha ekonomi seperti pertanian dan peternakan. *Keempat*, usaha ekonomi bagi para alumni santri. Pengurus pesantren dengan melibatkan para alumni santri menggalang sebuah usaha tertentu dengan tujuan untuk menggagas suatu usaha produktif bagi individu alumni, syukur bagi nanti keuntungan selebihnya dapat digunakan untuk mengembangkan pesantren.⁴

Bentuk pemberdayaan UMKM dapat secara langsung (seperti pemberian modal usaha, pendidikan keterampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan ketrampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain). Dengan adanya pemberdayaan UMKM di pesantren dapat membantu financial serta pembangunan pesantren menjadi lebih maju serta dapat membangkitkan ekonomi umat. Santri santri di pondok pesantren pun dapat belajar dalam mengembangkan ekonomi tidak hanya melalui pembelajaran semata dan melatih kemandirian para santri.

3. Karakteristik dan Peran Pesantren dalam Ekonomi Islam

Menurut wahdino sastro dalam islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga prilakunya dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut adalah karakteristik Usaha Mikro menurut perspektif Ekonomi Islam :⁵

- 1) Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (*nizhamun rabbaniyyun*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturanyang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan AS-sunnah.

³Dwi hadya jayani, *Kontribusi UMKM Terhadap Ekonomi Terus Meningkat*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat> pada 7 maret 2022, pukul 20.05 WIB

⁴ Muhammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren," *ECONOMICA : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 6 (2015): 48–49.

⁵Sastro Wahdino, *Ekonomi Makro Dan Mikro Islam*, (Jakarta : PT Dwi Chandra Wacan,2001),h. 52

- 2) Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (*iqtishadunaqdiyyun*), mengingat ekonomi islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dan akidah islamiah (al-aqidah alislamiyyah) yang di dalamnya akan dimintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang di yakini.
- 3) Berkarakter ta'abbudi (thabi'abbudiyun). Mengingat usaha Mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdasarkan ketuhanan (*nizam rabbani*).
- 4) Terkait erat dengan akhlak (*murtabhun bil-alhlaq*), islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah meletakkan pembangunan ekonomi dalam lindungan islam yang tanpa akhlak
- 5) *Elastic (al-murunah)*, *al-murunah* didasarkan pada kenyataan bahwa baik Al-Qur'an maupun al-hadist, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.
- 6) Objektif (*almaudhu'iyah*). Islam mengajarkan umat supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.
- 7) *Realistis (al-waqii'yyah)*. Perkiraan (*forecasting*) ekonomi khususnya perkiraan bisnis tidak selama sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
- 8) Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan orang terhadap harta kekayaan (al-amuwal) tidaklah bersifat mutlak.
- 9) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyidistikhdamal-mal*).

Secara garis besar, peran strategis pesantren dalam ekonomi syariah ada dua, yaitu : **Pertama** peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan dai yang *legitimed* di masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. **Kedua** adalah peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat⁶ pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat.

Selain itu, pesantren juga berperan sebagai lembaga produksi dan konsumsi. Pesantren sebagai lembaga produksi yang di tunjukkan dengan adanya penguasaan terhadap tanah yang luas, memiliki tenaga kerja dan teknonogi yang sangat diperlukan untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan, menunjukkan bahwa pesantren merupakan salah satu produsen. Jika sebuah pesantren bergerak dalam bidang pertanian, maka pesantren ini merupakan produsen dalam bidang pertanian, jika pesantren bergerak dalam bidang industri (kerajinan, kecil) maka pesantren sebagai produsen dalam bidang industri.⁷

METODE PENELITIAN

⁶Hamdan Rasyid, *Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Islam* diakses dari https://www.academia.edu/5333650/Peran_Pesantren_Dalam_Pengembangan_Ekonomi_Islam Pada 8 Maret 2022, pukul 19.40 WIB hal 4

⁷ Ibid., hal 5

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) kepada narasumber yang mengurus bidang pemberdayaan UMKM di pondok pesantren. Secara spesifik, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mengetahui informasi dari program pemberdayaan UMKM, hambatan, serta dampak dari pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Narasumber tersebut, dirasa mewakili untuk menjawab kebutuhan riset ini agar nantinya bisa mengungkap mulai dari mekanisme pelaksanaan, hambatan hingga dampak yang dirasakan oleh pihak pesantren dengan adanya program ini. Dalam melakukan wawancara dalam riset ini, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2009).

Indepth interview memiliki beberapa tahapan dalam proses pengumpulan datanya, tahapan tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Persiapan awal

Pada tahap persiapan awal, peneliti membuat janji dengan narasumber untuk melakukan wawancara.

b) Proses wawancara

Pada tahap ini, peneliti menyampaikan isu yang menjadi topik dalam penelitian. Kemudian peneliti memberikan maksud kedatangan sebagai pembuka dalam mengawali proses wawancara tentang beberapa pertanyaan kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar memudahkan peneliti dalam proses wawancara. Pelaksanaanya dengan langsung melakukan wawancara secara mendalam kepada narasumber.

Profil narasumber

No.	Nama narasumber	Umur	Posisi/jabatan
1.	H. Dahyar Husein, M.Pd	55 Tahun	Sub. Koordinator Seksi Pendidikan Diniyah, Kesejahteraan dan Sistem Informasi

Teknik Analisis

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan:

1. Rekaman. Peneliti merekam keseluruhan isi pembicaraan antara pihak peneliti dengan narasumber.
2. Hasil rekaman tersebut ditranskrip atau di tulis sesuai apa yang dikatakan narasumber di dalam rekaman.

Membahas dan menganalisa setiap kutipan yang berhubungan dengan konten bahasan penelitian dengan bantuan lampiran hasil transkrip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Pemberdayaan UMKM di Pondok Pesantren

Kantor wilayah kementerian agama provinsi sumatera utara merupakan lembaga yang mengurus mengenai keagamaan di wilayah Sumatera Utara. Dalam menjalankan fungsinya Kementerian Agama terdiri atas sub bagian yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Adapun yang mengurus mengenai pendidikan terdiri dua bidang, yaitu :

1. Bidang Pendidikan Madrasah
2. Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.

Di bidang pendidikan agama dan keagamaan islam terdiri atas 2 lembaga pendidikan agama

islam, yaitu pendidikan agama islam di sekolah formal (SD,SMP, SMA) dan pondok pesantren. Pondok pesantren yang dinaungi oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri atas dua jenis, yaitu : 1.) pesantren salafiyah 2.) pesantren modern. Pesantren salafiyah adalah sebuah sebutan bagi pondok pesantren yang dalam pembelajarannya mengkaji kitab-kitab kuning. Sedangkan pesantren modern memiliki pembelajaran yang kompleks, misalnya menerapkan kurikulum, metode dan kitab-kitab yang dipelajari.

Program pemberdayaan UMKM dipondok Pesantren merupakan sebuah upaya kerja sama antara pemerintah dan kementerian agama dalam membantu biaya operasional pesantren. Bentuk program pemberdayaan UMKM seperti pemberian materi berupa uang, melakukan workshop dan pelatihan pelatihan kepada pihak pesantren untuk membekali dalam pengembangan usaha. Dari hasil bantuan tersebut pihak pesantren dapat membangun usaha seperti usaha ternak kambing, usaha menjahit, usaha makanan dan lain sebagainya.

Menurut Pak Dahyar Husein selaku narasumber mengatakan “*semua pondok pesantren di Sumatera Utara tidak ada yang berstatus Negeri, semuanya berstatus swasta*”. Artinya dengan status swasta pondok pesantren harus mampu mengatasi biaya operasional di pesantren. Adapun cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan membangun usaha di pesantren. Sebagai contoh pesantren yang telah mengembangkan usaha UMKM di lingkungan pesantren yaitu pesantren Raudhatul Hasanah. Di Pesantren Raudhatul Hasanah telah memiliki usaha air minum dalam kemasan (AMDK), memiliki toko roti dan minuman kopi yang tidak jauh dari lingkungan pesantren. Selain itu, pesantren raudhatul hasanah juga menyediakan menu sarapan pagi serta penginapan yang di prioritaskan untuk wali santri yang datang ke pesantren.

Narasumber juga menyebutkan contoh pesantren yang sudah memberdayakan UMKM di pesantrennya yaitu pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Di pesantren ini telah membangun SPBU dan perkebunan kelapa sawit untuk membantu biaya operasional pesantren. Dengan adanya usaha tersebut, pesantren Musthafawiyah Purba Baru sudah tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena pendapatan mereka sudah tercukupi dari hasil usaha tersebut. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan semua pesantren di sumatera utara mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pengembangan ekonomi di pesantren. Kriteria pesantren yang berhak menerima bantuan UMKM, yaitu :

1. Pondok pesantren sudah memiliki izin operasional dari kemenag
2. Pesantren masuk dalam database EMIS
3. Pondok pesantren layak di bantu, jika dilihat dari sisi jumlah siswa, lokasi yang memadai dalam pendirian usaha.

2. Hambatan Dalam Mengimplementasikan Program Pemberdayaan UMKM Di Pondok Pesantren.

Menurut narasumber, program pemberdayaan UMKM ini ada beberapa kendala atau penghambat, yaitu kurangnya tenaga ahli di pesantren, kurangnya melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pihak pesantren dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM. Narasumber berharap ketika dilakukan pelatihan kepada pihak pesantren adanya pendampingan, dan ada tahapan –tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan usaha tersebut, jangan dilepas. Selama ini kementerian agama pusat di Jakarta memberikan bantuan peningkatan usaha ke kemenag tapi setelah diberikan bantuan, sudah tidak ada pendampingan, tidak berkelanjutan lagi. Narasumber juga mengatakan baiknya pendampingan dan tahapan yang sudah dilakukan ada laporan pertanggungjawaban, sehingga kementerian agama mengetahui apakah sudah ada peningkatan atau masih perlu dilakukan pembinaan. Narasumber juga mengatakan untuk diberikan bantuan

yang sebanyak-banyaknya kepada pesantren dan pondok pesantren yang paling membutuhkan yaitu pondok pesantren salafiyah. Pemberian bantuan diharapkan dilakukan secara merata hingga pesantren yang berhak untuk menerimanya.

KESIMPULAN

Saat ini peran pesantren tidak hanya menjadi wadah dalam menuntut ilmu agama saja, tetapi peran pesantren kini kian meluas yakni sebagai pengembangan UMKM di pondok pesantren. Di dalam pengembangan UMKM di pondok pesantren diberikan bantuan berupa uang, workshop serta pelatihan-pelatihan untuk membekali tenaga ahli dalam menjalankan usaha. Dari adanya pemberdayaan UMKM di pondok pesantren dapat meningkatkan pendapatan serta membantu biaya operasional di pesantren. Dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM di pondok pesantren ditemukan beberapa kendala, yaitu kurangnya tenaga ahli di pesantren dan kurangnya melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pihak pesantren dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Hanim, Lathifah & Ms. Noorman. 2018. *Umkm (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) Dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Jawa Tengah : Unissula Press.
- Jayani, Dwi hadya. 2021. “Kontribusi UMKM Terhadap Ekonomi Terus Meningkat” diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat> pada 7 maret 2022, pukul 20.05 WIB
- Nadzir, Muhammad. 2015. “Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren.” *ECONOMICA : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam Volume 6* (hal. 48–49)
- Rasyid, Hamdan. *Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*” diakses dari https://www.academia.edu/5333650/Peran_Pesantren_Dalam_Pengembangan_Ekonomi_Islam Pada 8 Maret 2022, pukul 19.40 WIB
- Sugandi A, Tanjung HB dkk. 2017. “Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *jurnal Tadbir Muwahhid volume 1, no. 2* (hal. 101)
- Wahdino, Sastro. 2001. *Ekonomi Makro Dan Mikro Islam*. Jakarta : PT Dwi Chandra Wacan